

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA
TAHUN 2021**



**Gedung Samin Surosentiko, Jl. Pemuda No. 12 Blora Jawa
Tengah
TELEPON: 0296525080**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha sampai saat ini selalu berupaya untuk berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan untuk melaksanakan Visi dan Misi yang merupakan Landasan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang lebih baik (Good Corporate Governance).

Dalam rangka mencapai visi misi tersebut dan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya dalam menghadapi globalisasi perbankan, dibutuhkan manajemen pengelolaan Bank yang dilandasi dengan prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) dan etika perbankan yang kuat.

Pelaksanaan Tata Kelola/ Good Corporate Governance (GCG) sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Bank agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank semakin meningkat.

Guna meningkatkan sistem pengendalian intern Bank, terciptanya tata kelola yang baik, efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah (value added) bagi Bank ke depan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank sesuai dengan kaidah-kaidah Perbankan yang sehat melalui 5 (lima) pilar dalam Tata Kelola / Good Corporate Governance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness yang disingkat dengan TARIF.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	ARIEF SYAMSUHUDA
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank serta melakukan pembinaan dan pengendalian b. Menyusun strategi dan rencana kerja (Rencana Bisnis Bank (RBB)) untuk mencapai anggaran; c. Terkoordinasinya semua aktivitas, baik bagian pemasaran, pendanaan, perkreditan, operasional, pengawasan dan Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya; d. Tercapainya pertumbuhan tingkat kesehatan, tingkat laba, rasio kredit bermasalah dan efisiensi pada tingkat optimal; e. Terjaminnya pelaksanaan operasional, pemasaran dan pelayanan dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; g. Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR dan Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; h. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; i. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, dan hasil Pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan Program APU dan PPT;		
2.	Nama	:	SIGIT ARIE HERYANTO
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bersama dengan Direktur Utama dalam penyusunan strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran; b. Bersama Direktur Utama menentukan sasaran-sasaran dan melaksanakan rencana dalam bidang pemasaran, operasional, administrasi, manual perbankan, organisasi, tatalaksana umum serta personalia baik jangka pendek maupun jangka panjang; c. Terkoordinasinya aktivitas bidang pemasaran, operasional dan pelayanan dengan sebaik-baiknya; d. Pencapaian anggaran, kredit dan penghimpunan dana serta hasil operasional sesuai target kerja di setiap bagian;		



- e. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dengan baik, tertib dan lancar, serta aktivitas operasional sesuai ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Pengawas diantaranya melakukan evaluasi kinerja kepada semua staf dan PE atau Kabag minimal 1 bulan sekali.
2. Melakukan monitoring debitur besar karena bisa berdampak signifikan terhadap NPL
3. Melakukan monitoring terhadap debitur yang terdampak Covid-19 terutama debitur yang telah dilakukan restrukturisasi karena Covid.
4. Menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan OJK Tahun 2021 sesuai dengan komitmen

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Mochamad Mutiyono
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan bank secara rutin; 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan operasional bank serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Membuat laporan hasil pengawasan setiap semester kepada pemilik;		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
1. Untuk selalu dilakukan evaluasi terhadap kinerja untuk semua karyawan secara periodik; 2. Memastikan kepada Direksi bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berjalan dengan baik; 3. Mempertahankan tingkat kesehatan Bank selalu terjaga dalam posisi sehat; 4. Untuk selalu monitoring terhadap debitur besar yang berpotensi bisa menimbulkan NPL; 5. Untuk selalu memonitoring debitur yang terdampak adanya Covid-19, terutama nasabah yang direstrukturisasi karena Covid.			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tidak ada	
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tidak ada	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	



Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Nihil

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	Rp0,00	0%
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ARIEF SYAMSUHUDA			
2.	SIGIT ARIE HERYANTO			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	ARIEF SYAMSUHUDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SIGIT ARIE HERYANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mochamad Mutiyono	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mochamad Mutiyono			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mochamad Mutiyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mochamad Mutiyono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp267.884.496,00	1	Rp120.845.674,00
2.	Tunjangan	2	Rp497.920.764,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	2	Rp22.415.549,00	2	Rp7.273.591,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp788.220.809,00		Rp128.119.265,00



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Operasional (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Jumlah Direksi ada 2 dan masing-masing Anggota Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan operasional. Sedangkan untuk asuransi kesehatan hanya BPJS Kesehatan.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.58 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.45 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Pada posisi Desember 2021, jumlah Dewan Pengawas hanya 1 orang sehingga rasio perbandingannya adalah 1:1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
-----	---------------	----------------	-------------------------



1.	04 Januari 2021	4	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target Tahun 2021; 2. Pemantauan terhadap debitur terdampak Covid-19; 3. Menghubungi Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Tahun 2021
2.	19 Maret 2021	5	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Februari, serta pencapaian target per tanggal 19 Maret 2021; 2. Penanganan kredit bermasalah sebagai upaya untuk peurunan NPL;
3.	04 Mei 2021	6	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan April 2021; 2. Penanganan kredit bermasalah; 3. Pembahasan isu terkini diantaranya yaitu adanya rencana dilakukan PPKM di sejumlah tempat terutama di Kabupaten Blora dikarenakan jumlah penderita semakin bertambah.
4.	10 Juni 2021	5	1. Evaluasi kinerja dan pencapaian target bulan Mei 2021; 2. Penanganan kredit bermasalah; 3. Perubahan dan Revisi Rencana Bisnis Bank; 4. Evaluasi dan pencapaian RBB Tahun 2021;
5.	18 Agustus 2021	7	1. Evaluasi kinerja dan pembinaan; 2. Evaluasi pencapaian target bulan Juli 2021; 3. Penanganan kredit bermasalah.
6.	06 Oktober 2021	5	1. Evaluasi kinerja, pembinaan serta pencapaian target sampai dengan bulan September 2021; 2. Monitoring debitur terdampak Covid-a9; 3. Penanganan kredit bermasalah;
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dalam 1 tahun lebih fokus pada evaluasi kinerja, penanganan kredit bermasalah serta monitoring terhadap debitur terdampak Covid 19			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Mochamad Mutiyono	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas, sehingga jumlah anggota Dewan Pengawas hanya 1 (satu). Untuk pelaksanaan rapat Anggota Dewan Pengawas dilakukan bersama dengan Direksi dan pejabat Bank.				



I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							



3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	18 Mei 2021	Sosial	Partisipasi wakaf untuk pembangunan rumah Tahfidz Qur'an	Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah	Rp2.000.000,00
2.	05 Mei 2021	Sosial	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	SMA NEGERI 2 BLORA	Rp1.500.000,00
3.	21 Juli 2021	Sosial	Kegiatan pemotongan hewan (sapi) dalam rangka hari raya Idul Adha dan dibagikan kepada orang yang tidak mampu	Panitia Qurban	Rp23.400.000,00
4.	06 Desember 2021	Sosial	Kegiatan sosisl bantuan untuk warga lereng Gunung Semeru	Perbarindo Jateng	Rp1.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Semua kegiatan sosial diatas dibiayai dari anggaran perusahaan yang dimasukkan dalam Biaya Non Operasional Lainnya					

BLORA, 12 April 2022

PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA

Menyetujui

MOCHAMAD MUTIYONO
Anggota Dewan Pengawas

ARIEF SYAMSUHUDA
Direktur Utama



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA
Alamat : Gedung Samin Surosentiko, Jl. Pemuda No. 12 Blora Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0296525080
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp9.181.777.669,00
Total Aset : Rp103.814.055.526,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.12	0.224
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.24	0.336
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.61	0.161
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.45	0.145
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.46	0.146
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.5	0.113
10	Rencana Bisnis BPR	2.07	0.155
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.5	0.113
Nilai Komposit			1.6
Predikat Komposit			Sangat Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.12)

Direksi berjumlah 2 orang. Modal inti Bank masih dibawah Rp. 50Miliar sehingga salah satu Direksi merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam hal ini dirangkap oleh Direktur Utama. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak ikut serta dalam penyaluran dana, akan tetapi bertanggung jawab terhadap kualitas penyalurannya. Semua Direksi telah lulus fit and proper test dari OJK.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.24)

Adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dalam waktu yang lama, sehingga fungsi pengawasannya tidak optimal. Pihak BPR telah menginformasikan dan mengusulkan kepada pemilik sebelum masa jabatannya habis, akan tetapi sampai dengan laporan ini disusun belum terisi, dan masih proses administrasi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Nihil

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Selama periode laporan ini disusun, belum pernah terjadi suatu tindakan atau kebijakan dari Direksi yang mengandung benturan kepentingan. Direksi telah menyusun dan mengkinikan kebijakan terkait benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.61)

Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan dengan baik, Dimana Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan karena modal inti masih dibawah Rp. 50 Miliar. Dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh PE Kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.45)

Bank telah mempunyai PE audit intern dalam hal ini SPI yang telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Laporan hasil audit internal telah disampaikan kepada Direksi, Dewan Pengawas serta OJK

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

Bank telah menunjuk dan menugaskan Audit Eksternal (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, dimana Audit Eksternal tersebut telah mendapatkan persetujuan oleh pemilik, dalam hal ini Bupati Blora. Dan laporan hasil audit tersebut telah disampaikan dan dilaporkan kepada OJK

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.46)

Perumda BPR Bank Blora Artha telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan , dimana penilaiannya dalam bentuk profil risiko. Laporan profil Risiko telah disampaikan kepada OJK secara semesteran



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.5)

Perumda BPR Bank Blora Artha telah memiliki prosedur tertulis mengenai BMPK, sehingga dapat menjadi acuan dalam pemberian kredit agar tidak melanggar ketentuan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.07)

Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh pemilik serta telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik sangat mendukung RBB yang telah disusun, akan tetapi dukungan dalam hal penambahan setoran modal sangat kurang, sehingga dapat berpengaruh TKS Bank.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. Bank telah menyusun laporan keuangan baik laporan bulanan maupun laporan publikasi dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian dan analisis terhadap seluruh aspek serta indikator penilaian penerapan tata kelola Perumda BPR Bank Blora Artha Tahun 2021 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan, dimana tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi telah berjalan dengan baik.
2. Pemenuhan jumlah Dewan Pengawas dikarenakan adanya kekosongan jabatan Ketua Dewan Pengawas dalam waktu yang cukup lama, sehingga fungsi pengawasannya belum bisa berjalan optimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penilaian TKS terutama manajemen Bank.
3. Semua ketentuan dan kebijakan telah disusun dan dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat menjadi pedoman dalam semua kegiatan operasional perusahaan.
4. Tambahan setoran modal dari pemilik sangat dibutuhkan karena untuk memperkuat permodalan Bank (CAR)
5. Perumda BPR Bank Blora Artha berupaya untuk selalu menerapkan budaya kepatuhan
6. Dari hasil penilaian penerapan tata kelola BPR diperoleh nilai komposit 1,6 dengan predikat SANGAT BAIK. Dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya mengalami penurunan nilai komposit sebesar 0,13 dari nilai komposit 1,47 meskipun predikat masih sama yaitu SANGAT BAIK. Kedepannya, Bank akan senantiasa mengupayakan agar penilaian tata kelola selalu meningkat lebih baik dari penilaian sebelumnya.



BLORA, 12 April 2022

PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA



MOCHAMAD MUTIYONO
Anggota Dewan Pengawas

Menyetujui



ARIEF SYAMSUHUDA
Direktur Utama